

Edukasi Pariwisata dan Aksi Sisir Pantai dari Sampah Wisata dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat

Mary Ismowati ^{a,1,*}, Bhakti Nur Avianto ^{b,2}, Angga Sulaiman ^{c,3}, Anggra Liany Rihadatul Aisi ^{d,4}, Vicky Zaynul Firmansyah ^{e,5}

^{a,b,c,d,e} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta

¹maryismowati@civitas.unas.ac.id *

*corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords:

Participation, Education,
Tourism Waste

ABSTRACT

The development of the tourism sector in Indonesia is growing. The determination of Labuan Bajo as a National Tourism Strategic Area makes it one of the premium tourist areas in Indonesia. Tourism development in its implementation found various obstacles and problems. We carry out community service programs in Labuan Bajo, to find out the problems and obstacles to tourism development. Our method is to conduct interviews and observe tourism locations. And we see the government's response and the community's response in an effort to maximize tourism potential in Labuan Bajo. We provide education and training regarding the utilization of tourism potential so that it has an impact and economic value. Second, we take action to clean up tourist sites and provide an understanding of how to manage waste in 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle). The results we found, the community is still less involved in participation in tourism development, the government is still not optimal in policy regulation and utilization of tourism potential, and the biggest tourism problem occurs in poor tourism waste management.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perkembangan pembangunan nasional. Pariwisata merupakan sektor industri yang memberikan pelayanan dan menyuguhkan potensi alam dan keunikan suatu wilayah. Sektor pariwisata tumbuh menjadi penggerak ekonomi yang berperan dalam upaya pembangunan nasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam flora dan fauna, keunikan adat, budaya, seni, dan tradisi yang memberikan potensi pembangunan pariwisata nasional. Pariwisata merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional yang berkaitan dan memiliki dampak pada sektor pembangunan lainnya, terlebih pada pendorong perekonomian. Dengan berkembangnya industri pariwisata, akan mendorong perkembangan pada sektor lain, seperti: kunjungan wisatawan, ekonomi kreatif, membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka pengangguran, apabila dari semua potensi tersebut sudah dikelola dengan baik dan maksimal (S, Prastiwi, 2016)

Pariwisata merupakan penopang proses pembangunan, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dominan dalam kerangka pembangunan ekonomi (Wijayanti, 2017). Pengembangan pariwisata di suatu daerah yang dikelola dengan baik terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah. Pariwisata terbukti memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat seperti: menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi dan pajak dan sebagainya (Hermawan, 2016).

Perkembangan pariwisata di Indonesia beberapa tahun ini mulai menunjukkan eksistensinya. Sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor ekonomi yang dapat bangkit dengan cepat, maka dari itu pemerintah telah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas atau disebut juga 10 Bali Baru. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN) tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan total 25 lokasi KSPN. Dari 25 KSPN Prioritas tersebut, Kementerian Perekonomian Bidang Maritim dan Sumber Daya memfokuskan pengembangan pada 10 KSPN Prioritas. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Nomor S-54/Menko/Maritim/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah ditetapkan 5 KSPN Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo (Moerwanto A & Junoasmoro, 2017). Maka lima KSPN super prioritas ini tentunya harus dikelola dengan baik.

Presiden di Rapat Terbatas Kabinet Tanggal 15 Juli 2019 di Jakarta telah menetapkan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di lima wilayah yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika – Lombok (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara). Penetapan ini adalah pengerucutan dari sebelumnya pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan pengembangan 10 Destinasi Wisata Prioritas atau yang disebut “10 Bali Baru”. Penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membuat upaya pembangunan, mulai dari infrastruktur, peningkatan SDM, peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat serta peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor pariwisata di Labuan Bajo harus ditingkatkan. Masalah terbesar yang dihadapi sekarang adalah kurangnya partisipasi dan peran masyarakat sekitar dalam mensukseskan pembangunan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Pemahaman dan pelatihan terhadap pentingnya memaksimalkan potensi kekayaan daerah guna mendorong perekonomian masih kurang, sehingga pentingnya edukasi dan pemahaman tentang pariwisata perlu diupayakan (sumber FGD Manggarai Barat 9 Maret 2022).

Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003). Kegiatan wisata edukasi menjadi upaya yang menerapkan konsep perpaduan antara kegiatan wisata dengan melakukan pembelajaran dan memberikan pemahaman. *Edu-Tourism* atau Pariwisata Edukasi dimaksudkan sebagai suatu program di mana peserta kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi (Rodger, 1998). Pentingnya edukasi, pemahaman dan pembelajaran mengenai pariwisata terhadap masyarakat lokal nantinya mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya memaksimalkan potensi daerah. Sebab peran pemerintah tidak akan cukup dalam memaksimalkan pembangunan, jika masyarakatnya tutup mata.

Masalah lain yang dihadapi pada sektor pariwisata adalah munculnya sampah wisata. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dalam hal ini sampah menjadi sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi sebuah barang yang bernilai. Sampah yang menjadi salah satu persoalan terbesar dalam setiap kegiatan terkhusus kegiatan pariwisata yang disebut dengan sampah wisata. Sampah ini dapat menyebabkan permasalahan di lingkungan sekitarnya (Peraturan Daerah, 2012).

Adanya sampah wisata dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan dan justru menghancurkan industri pariwisata itu sendiri (Suryono, 2001). Pengelolaan akan wisata yang lebih berfokus pada bagaimana mendatangkan para wisatawan untuk mengejar hasil ekonomi yang lebih besar, justru akan semakin meningkatkan sampah wisata yang dihasilkan dari para wisatawan tersebut.

Dari penelitian tentang pengelolaan sampah program Citahum Harum, diketahui ada beberapa cara dalam pemungutan sampah. Dan banyak strategi yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah (Zakia et al., 2019). Bank sampah menjadi salah satu alternatif menyelesaikan permasalahan sampah (Asteria & Heruman, 2016).

Masalah meningkatnya volume sampah jika tidak dilakukannya perubahan dalam penanganannya seperti pengelolaan sampah wisata, baik teknis maupun kebijakan politis, dalam waktu dekat diprediksi dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan cukup signifikan di tempat-tempat wisata tersebut, baik langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah ialah

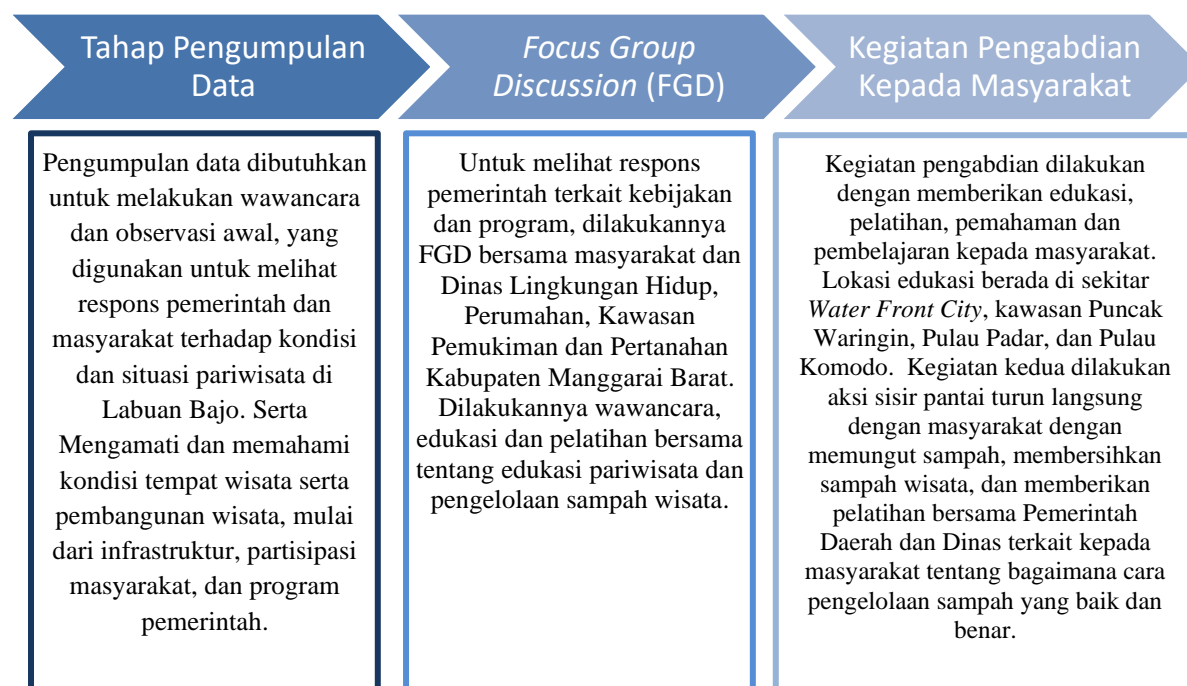
sisia daripada aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam dalam bentuk padat. Sampah menjadi isu lingkungan atas permasalahan global yang terus memerlukan solusi untuk perubahan ke arah lebih baik. Dengan adanya pengelolaan sampah menjadi argumentasi yang perlu dikembangkan untuk kehidupan yang nyaman dan lingkungan yang sehat bagi seluruh umat manusia hari ini dan esok menjadi sebuah komitmen seluruh bangsa di dunia.

Dari hasil survey awal diketahui Labuan Bajo yang dikenal sebagai tempat pariwisata yang indah juga dihadapkan dengan persoalan pengelolaan sampah wisata. Persoalan sampah wisata Labuan Bajo dalam satu hari bisa menghasilkan sebanyak 30 ton/hari. Salah satunya berasal dari Puncak Waringin. Selain itu sampah masih berserakan di sejumlah ruas jalan kota yang dibuang secara sengaja atau karena ketidatahuan peraturan K3 bagi publik sehingga masih menjadi persoalan serius di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata super premium serta tempat penyelenggaraan KTT G20 di Tahun 2023 nanti, berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, namun tidak diimbangi dengan pemanfaatan pengelolaan daur ulang sampah sebagai penghasil ekonomi kreatif masyarakat sekitar baik oleh pelaku usaha UMKM untuk memasarkan produk kerajinan tangan dan souvenir.

Juga dari survey awal wawancara dengan masyarakat di lokasi wisata *Water Front City* Labuan Bajo bahwa permasalahan utama yang terjadi di salah satu lokasi studi di *Water Front City* terkait lingkungan dan pengetahuan akan sampah wisata setempat terletak pada: kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan dan sampah wisata, kurangnya kemampuan melihat peluang ekonomi dari sampah wisata yang membuat masyarakat merasa dirugikan karena adanya sampah sekitar, kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan dengan potensi destinasi wisata dan minimnya pengetahuan tentang pemilahan 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*). Sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur perlu merancang kebijakan maupun program yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorongnya untuk lebih kreatif dan inovatif pada sampah wisata

PELAKSANAAN DAN METODE

Tim pengabdian kepada masyarakat 2022 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta melakukan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Labuan Bajo terhadap upaya memaksimalkan sektor pariwisata dan pendampingan cara membersihkan serta cara pengelolaan sampah wisata. Kegiatan pengabdian ini juga bertujuan untuk memahami permasalahan pariwisata di Labuan Bajo dan berupaya mencari solusi dengan melihat respon pemerintah dan respon masyarakat dalam upaya pembangunan pariwisata. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 6 hari pada tanggal 08-13 Maret 2022, berlokasi di Kawasan *Water front City*, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Dengan menggunakan metode di atas Tim Pengabdian kepada masyarakat 2022 Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional menemukan permasalahan yang terjadi, bahwa masyarakat kurang mengerti akan pemahaman pengelolaan sampah dan kurangnya edukasi pemahaman tentang memaksimalkan potensi pariwisata dan pengelolaan sampah wisata. Tingkat partisipasi masyarakat yang kurang membuat pembangunan pariwisata di Labuan Bajo belum maksimal dan kurang memberikan dampak nyata bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah direncanakan 5 bulan sebelum kegiatan pada tanggal 08-13 Maret 2022. Tahap-tahap kegiatan pengabdian yang kami lakukan meliputi, yaitu:

1) Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun Rancangan Kegiatan Pengabdian

Pada tahap ini terlebih dahulu membuat rumusan permasalahan, analisis mendalam berdasarkan permasalahan, kajian teori dan menentukan lokasi pengabdian yang akan dijadikan obyek pengabdian, untuk kemudian membuat kerangka usulan judul yang akan digunakan untuk membuat proposal pengabdian.

b. Mengurus Perizinan

Setelah membuat usulan pengabdian dalam bentuk proposal, tahap selanjutnya adalah mengurus perizinan kepada atasan Universitas Nasional dan mengurus perizinan kegiatan pengabdian ke pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

2) Tahap Orientasi

Pada tahap ini, peneliti akan mengadakan pengumpulan data secara umum, melakukan observasi, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi luas mengenai hal-hal yang umum dari obyek pengabdian kepada masyarakat tentang upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan edukasi pariwisata dan pengelolaan sampah wisata. Pelatihan, observasi dan wawancara mendalam akan dilakukan langsung pada para masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar Desa Batu Cermin dan area wisata. Sedangkan *Focus Group Discussion* (FGD) akan dilaksanakan dengan menghadirkan

masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, untuk melakukan kegiatan Edukasi dan Pelatihan Bersama.

3) Tahap Eksplorasi

Pada tahap ini, berfokus pada kegiatan pengabdian dengan melakukan kegiatan aksi sisir pantai dan kegiatan edukasi pengelolaan sampah wisata kepada masyarakat dan wisatawan agar keberadaan sampah tidak hanya memberikan masalah lingkungan tetapi jika dikelola dengan baik mampu memberikan dampak dan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar.

Dari program yang telah dilakukan, yaitu edukasi pembelajaran tentang pariwisata, observasi dan wawancara bersama dengan masyarakat lokal, serta aksi sisir pantai pengelolaan sampah wisata hingga audiensi bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Persampahan dan Pariwisata, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, didapatkan 4 (empat) fokus utama mengetahui keadaan dan kondisi pariwisata dan pengelolaan akan sampah wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat secara implementatif.

1. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Masyarakat

Menurut Suryono (2001) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan. Pembangunan dapat berjalan secara terus menerus tetapi hasilnya akan sangat berbeda jika pembangunan tersebut didukung oleh partisipasi masyarakat (Kawulur et al., 2017). Partisipasi dalam pembangunan harus dilaksanakan sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri.

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat partisipasi dan peran pemerintah dalam upaya memaksimalkan potensi dan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo masih tergolong rendah. Masyarakat kurang mampu memanfaatkan potensi kekayaan pariwisata daerah menjadi ladang ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, dimana tidak adanya pelatihan dan pemahaman tentang pemanfaatan potensi wisata.



Gambar 1. Suasana Acara Edukasi dan Pelatihan Bersama Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan , 2022

Edukasi pembelajaran kepada masyarakat mengenai bagaimana memaksimalkan potensi pariwisata daerah yang mampu bermanfaat dan menghasilkan nilai ekonomi. Bersama dinas pemerintah terkait, dilakukan Forum Group Diskusi (FGD) edukasi untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini mengkaji berbagai hambatan dan permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi serta edukasi.

Hasilnya adalah terdapat kesenjangan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, kurangnya fasilitas pendukung pariwisata sehingga masyarakat kurang berkembang, dan potensi pariwisata di Labuan Bajo terancam oleh pengusaha luar daerah yang mendominasi sektor pariwisata. Sehingga dalam kegiatan pengabdian ini melakukan kegiatan pemberian edukasi pemahaman terkait memaksimalkan potensi pengelolaan dasar pariwisata kepada pemerintah daerah dan berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata di Labuan Bajo khusus di Kabupaten Manggarai Barat untuk mengelola dan menjaga sarana dan prasarana kegiatan pariwisata, mengadakan pelatihan menjadi tour guide, pengelola kawasan wisata dan pengembangan pemberdayaan UMKM pariwisata serta kegiatan lain dalam tahap implementasi kebijakan program pariwisata daerah.

2. Kondisi Sampah Wisata Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo

Isu lingkungan yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini menjawab persoalan kondisi sampah wisata setempat yang mana masih kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya sampah bagi lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan hasil kegiatan edukasi dan aksi sisir pantai masih ditemukannya banyak sampah di sekitar tempat wisata yang kebanyakan berupa sampah plastik kemasan, kaleng, makanan sisa, dan jenis sampah lainnya. (E.Leha et al., 2020) menyebutkan jenis sampah yang paling banyak dibuang oleh masyarakat di Labuan Bajo adalah sampah plastik sebesar 40%, lalu sisa makanan, sisa sayuran atau buah-buahan sebesar 21%, dan sisanya adalah sampah alam.

Dari hasil wawancara dengan salah satu informan, yang berkaitan dengan sampah wisata diketahui bahwa :

“Sangat menyayangkan kondisi salah satu Kawasan Super Prioritas Nasional ini dimana tempat sampah yang tersedia ditempat ini masih sangatlah minim. Dengan adanya kemiskinan tempat sampah tersebut terkadang masing ada masyarakat yang tega membuang sampah ke laut, kesadaran akan masyarakatnya masih kurang padahal kehidupan mereka juga berasal dari laut. Tempat wisata disini masih dalam pembangunan, berbicara masalah sampah”.

Informan lain juga menyampaikan hal yang mirip, bahwa **Joko (Pendatang dan Kontraktor, 40 tahun)** menyatakan:

“Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan oleh masyarakat masih minim. Dimana lingkungan seperti *Water Front City* yang sedang dibangun oleh Pemerintah Pusat ini memiliki tanaman disekitar yang baru ditanam itu haruslah rusak setiap paginya, ketika ditanya kepada masyarakat sekitar masih tidak tahu siapa yang berbuat, itu artinya kesadaran akan memberikan edukasi mengenai penjagaan lingkungan masih kurang”.



Gambar 2. Proses Wawancara dan Edukasi Kepada Masyarakat, 2022

Oleh karena itu, edukasi dan aksi sisir pantai yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan 25 kantong sampah di *Water Front City*. Hal ini memberikan rasa tanggung jawab berbagi pemahaman dengan menyajikan cara agar masyarakat dapat menjaga lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, pengurangan penggunaan sampah plastik, dan pengelolaan sampah untuk kesejahteraan hasil ekonomi yang memadai. Materi edukasi ini juga membahas tentang jenis-jenis sampah, cara mendaur ulang, dan apa yang tidak boleh dilakukan (Asteria dan Heruman, 2016).

3. Pola Pengelolaan Sampah Wisata

Dari hasil audiensi bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Pola pengelolaan sampah di Labuan Bajo sudah dalam rangka pengurangan sampah dengan masih menggunakan cara sederhana yaitu pemilahan. Sampah wisata ataupun yang berasal dari masyarakat sekitar untuk saat ini sudah mengalami penurunan menjadi 17 ton/hari untuk masuk sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dimana dengan alur pengambilan sampah diserahkan ke petugas dari Pemerintah Daerah dari jam 6 – 10 pagi, lalu dilanjutkan sore hari dari jam 5–6 sore. Berbicara mengenai adanya sampah yang belum diangkut ataupun masih berserakan di tempat wisata karena masih kurangnya kesadaran dalam membuang sampah untuk masyarakat yang menggunakan fasilitas wisata atau masyarakat pinggiran tempat wisata, sejatinya Dinas Lingkungan sudah menyiapkan edaran bahwa sampah itu harus dibuat pada tempatnya mulai pukul 20.00 – 05.00 WITA. Jika masih ada sampah masyarakat diluar dari waktu tersebut berarti petugas telah membersihkannya karena petugas akan mengambil sampah sesuai jadwalnya.



Gambar 3. Aksi Pembersihan dan Pengambilan Sampah di Lokasi Wisata *Water Front City*, 2022

Tahap pengelolaan sampah dilakukan menggunakan perencanaan teknis pengelolaan sampah terpadu 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) yaitu:

1. Tahap Persiapan.

Tahap awal merupakan persiapan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan melakukan tindakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar program pengelolaan sampah berbasis masyarakat khususnya teknologi pengomposan di tingkat masyarakat. Dinas Kebersihan mengembangkan metode dan pendekatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi antara lain; menentukan pemilihan lokasi, menetapkan organisasi dan pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

2. Tahap Pemilihan Lokasi

Tahap pemilihan lokasi disini merupakan awal dari tahapan pendataan lokasi tempat wisata yang akan dipilih untuk melaksanakan program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil kajian studi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Retail Tata Ruang Kota (RDTRK).

3. Tahap Perencanaan Teknis.

Tahap perencanaan teknis adalah tahap penyusunan dokumen kerja serta melakukan pengadaan peralatan pengelolaan sampah. Peralatan prasarana dan sarana persampahan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) yang meliputi penentuan jenis dan jumlah peralatan, baik untuk pemilahan jenis sampah, pewadahan dan pengangkutan dan alat pengolahan sampah untuk menjadi kompos, termasuk mengidentifikasi kebutuhan tempat untuk pengolahan sampah terpadu TPS (Tempat Penampungan Sementara).

4. Tahap Pengorganisasian Masyarakat

Tahap ini terdiri dari melakukan identifikasi lokasi terpilih, melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan cara memperkenalkan program pengelolaan sampah, pembentukan organisasi, melakukan pelatihan pengelolaan sampah terpadu. Kegiatan penyusunan program sampah 3R (*reuse, reduce, recycle*) membuat identifikasi permasalahan dan menentukan rumusan permasalahan serta menentukan kebutuhan yang dilakukan dengan metode penyerapan aspirasi masyarakat dan melakukan survei kampung sendiri dan menyusun analisis permasalahan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan serta menentukan potensi sumber daya setempat (Dwiyanto, 2011).

5. Tahap Evaluasi dan Uji Coba Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R

Tahap evaluasi ini merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, dan dilakukan pengontrolan secara intensif dalam upaya menyiapkan kemandirian masyarakat.

4. Peran Pemerintah Dalam Edukasi Penanggulangan Sampah Wisata

Pemerintah telah menetapkan Surat Edaran Bupati No: DLHK.660/140/Skrt/VI/2019 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai (Kantong plastik, Sedotan plastik, Botol plastik minuman, Kemasan/pembungkus makanan plastik) dengan didampingi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 55 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Peraturan Daerah, 2012).

Hal ini artinya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah berperan dengan membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah.

Selain itu Pemerintah Daerah setempat bersama masyarakat pun juga terlibat pada penanggulangan sampah seperti sosialisasi pembuangan sampah, pengelolaan, sampai dengan daur ulang sampah. Dibantu oleh 30 lebih penggiat sampah yang berasal dari partisipasi masyarakat sendiri, telah diketahui bahwa banyaknya sampah tersebut berasal dari pulau-pulau dan langsung dikelola dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Hal ini tentunya dalam pengelolaan sampah wisata yang melibatkan warga setempat justru sangat membantu masyarakat untuk kesejahteraan keluarga, namun dengan adanya pengelolaan sampah bukan berarti memiliki ekonomis yang tinggi, mengingat penggiat sampah yang dilakukan atas inisiasi sendiri itu untuk membantu pemerintah daerah setempat. Maka dari itu, dikeluarkannya kebijakan jangka panjang untuk mengantisipasi persampahan Labuan Bajo dengan bantuan Pemerintah Pusat yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dari sampah. Dengan kebijakan tersebut pada akhirnya penanganan sampah di Labuan Bajo pada tahun 2022 sudah lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kebijakan mengenai kebersihan sudah adanya anggota penyapu jalan yang di mulai dari tahun

2021 sekitar 119 orang melakukan pemindahan sampah walaupun pengolahannya belum maksimal, dengan dibantu adanya TPA Waroka.

PENUTUP

Simpulan

Dari data dan proses pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan sektor pariwisata Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN) di Labuan Bajo masih sangat rendah. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah ini diakibatkan oleh kurangnya pemberdayaan, pelatihan, edukasi dan pemahaman tentang potensi sektor pariwisata bagi perekonomian masyarakat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pelatihan pembentukan UMKM pariwisata, mengelola dan menjaga sarana dan prasarana kegiatan pariwisata, mengadakan pelatihan menjadi *tour guide*, pengelola kawasan wisata serta kegiatan lain dalam tahap implementasi kebijakan program pariwisata daerah. Hal lain yang menjadi permasalahan pembangunan pariwisata selain tingkat partisipasi masyarakat yang rendah adalah sistem pengelolaan sampah wisata yang kurang baik di Labuan Bajo. Berbagai tahapan pengabdian yang telah dilakukan, yaitu memberikan pemahaman atau edukasi mengenai pemanfaatan potensi ekonomi pariwisata kepada masyarakat lokal dan melakukan pembersihan dengan pengambilan sampah di lokasi wisata. Juga dilakukannya edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik melalui teknis pengelolaan sampah terpadu 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada sub bidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Persampahan dan Pariwisata, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Saran

Saran kepada pemerintah daerah Kabuapten Manggarai Barat harus terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam berbagai upaya pembangunan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Memberikan pemberdayaan dan pelatihan mengenai sektor pariwisata dan UMKM pariwisata, serta membangun fasilitas, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang baik dan benar yang nantinya mampu bernilai ekonomi.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan terhadap program pengabdian kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 8.

E.Leha, E., Wolo, D., Marselina, A., & Parera, H. R. (2020). Dampak Manajemen Sampah Terhadap Keberlanjutan Pariwisata di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup*, 5(2), 120–146.

Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggaran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117.

Kawulur, I., Marlien, T. L., & J.E., K. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*, 1(1), 1–14.

Moerwanto A, A. S., & Junoasmoro, T. (2017). Strategi pembangunan infrastruktur wisata terintegrasi. *Jurnal HPJI*, 3(2), 67–78.

Peraturan Daerah. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No.12 Tahun 2012*

tentang Pengelolaan Sampah. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/article/view/13838>

Peraturan Gubernur NTT No 55 tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Nusa Tenggara Timur Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

S, Prastiwi, S. (2016). Manajemen Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Dalm Mengembangkan Potensi Objek Wisata Edukasi Little Teksas Wonocolo. *Publika*, 4(11).

Suryono. (2001). *Teori dan Isi Pembangunan.* Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press.

Surat edaran Bupati No: DLHK.660/140/Skrt/VI/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (Kantong Plastik, Sedotan Plastik, Botol Plastik Minuman, Kemasan/Pembungkus Makanan Plastik)

Zakia, Z., Agustina, D., Dewi, M. P., Ismowati, M., Vikaliana, R., & Saputra, M. (2019). Mewujudkan Sistem Pengelolaan Sampah Melalui Program Citarum Harum. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 38–43. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i1.291>